

**KOLABORASI ANTARA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH DENGAN MASYARAKAT
DALAM MENANGGULANGI BENCANA BANJIR
BANDANG DI KABUPATEN LAHAT PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

Putri Agusna

NPP. 32.0138

Asdaf Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan

Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email: putriagusna26@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dra. Nunung Royani, M.M

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Lahat Regency is a highland area with a humid tropical climate and high rainfall, making it prone to flooding. In the last 5 years, Lahat Regency has always experienced flash floods and the average is caused by high rainfall, so collaborative action is needed between the government and the community to overcome this problem. **Purpose:** This research was conducted with the aim of knowing the collaboration of regional disaster management agencies with the community in overcoming flash flood disasters in Lahat Regency. **Method:** In this study, researchers applied a descriptive qualitative approach. The major theory used in this research is the theory of Collaborative Governance by Ansell and Gash in 2008. Observation, document study and semi-structured interviews, as well as data triangulation were used as techniques in data collection. The total number of informants involved was 13 people. The implementation of data analysis used through data reduction, data presentation and also drawing conclusions and verification. **Result:** The findings at the research location related to the collaboration process in handling flash floods in Lahat Regency can be seen in the analysis of several dimensions, in the dimension of dialogue between stakeholders has been carried out well between the government and the community, in the dimension of building trust in collaboration has begun to establish trust between the stakeholders involved, in the dimension of joint commitment to the collaboration process has been running but still needs to increase the commitment that is established, in the dimension of mutual understanding there is still a need to equalize perceptions because some communities have not been able to understand the task optimally, in the dimension of temporary results in general the collaboration process is able to run well and has a positive impact on accelerating the handling of flash floods in Lahat Regency. **Conclusion:** From the results of the research conducted, it can be concluded that the collaboration between the Regional Disaster Management Agency (BPBD) and the community of Lahat Regency in handling post-flood disasters has been well implemented, which can be seen through the dimensions of the collaborative governance process

Keywords: Collaboration, flash floods, BPBD Lahat

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten Lahat merupakan daerah dataran tinggi dengan iklim tropis yang lembab dan curah hujan yang tinggi, sehingga rawan terhadap banjir yang menimbulkan korban. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir Kabupaten Lahat selalu mengalami banjir bandang dan rata rata

disebabkan karena curah hujan tinggi, sehingga dibutuhkan tindakan kolaboratif antara pemerintah dan Masyarakat untuk mengatasi masalah ini. **Tujuan:** Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui kolaborasi badan penanggulangan bencana daerah dengan masyarakat dalam menanggulangi bencana banjir bandang di Kabupaten Lahat. **Metode:** Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif. Teori besar yang dipakai dalam penelitian ini ialah teori *Collaborative Governance* oleh Ansell dan Gash tahun 2008. Pelaksanaan observasi, studi dokumen dan wawancara semi terstruktur, serta pelaksanaan triangulasi data digunakan sebagai teknik dalam pengumpulan data. Total informan yang terlibat sebanyak 13 orang. Pelaksanaan analisis data yang digunakan melalui reduksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan dan verifikasi. **Hasil/Temuan:** Temuan di Lokasi penelitian terkait proses kolaborasi dalam penanganan bencana banjir bandang di Kabupaten Lahat terlihat pada analisis beberapa dimensi, pada dimensi dialog antar muga sudah dilakukan dengan baik anatar pemerintah dan juga pihak Masyarakat, pada dimensi membangun kepercayaan dalam berkolaborasi sudah mulai terjalin rasa percaya antar stakeholder yang terlibat, pada dimensi Komitmen bersama pada proses kolaborasi sudah berjalan namun masih perlu peningkatan komitmen yang terjalin, pada dimensi pemahaman bersama masih perlu penyamaan persepsi karena beberapa Masyarakat belum mampu memahami tugas dengan maksimal, pada dimensi hasil sementara secara umum proses kolaborasi mampu berjalan dengan baik dan berdampak positif pada percepatan penanganan banjir bandang di Kabupaten Lahat. **Kesimpulan:** dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan masyarakat Kabupaten Lahat dalam penanganan pasca bencana banjir telah terlaksana dengan baik, yang terlihat melalui dimensi proses collaborative governance.

Kata Kunci: Kolaborasi, Banjir Bandang, BPBD Lahat.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di antara lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Hal ini membuat letak geografis di Indonesia menjadi unik (Saripudin et al., 2023). Salah satu dampak dari letak geografis yang ada di Indonesia sebagai negara kepulauan yaitu memiliki dua musim yang berbeda. Perbedaan kedua musim yang ada di Indonesia ini berdampak kepada kehidupan dan juga pola hidup masyarakat di Indonesia. Indonesia menghadapi peningkatan bahaya bencana hidrometeorologi seperti banjir (Knotters et al., 2024), kekeringan, badai, kebakaran hutan, tanah longsor, curah hujan yang berlebihan, dan angin kencang. Bencana adalah suatu kejadian yang merusak pola kehidupan yang teratur, merugikan manusia, lembaga sosial, dan kebutuhan Masyarakat (Muhammad & Aziz, 2020). Sedangkan bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh kejadian alam dan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian materi, dan kematian manusia.

Tabel 1

No	Bencana	Jumlah Kejadian Bencana
1	Banjir	1.255
2	Cuaca Ekstrem	1.261
3	Tanah Longsor	591
4	Karhutla	2.051
5	Gempa Bumi	31
6	Gelombang Pasang & Abrasi	33
7	Kekeringan	174
8	Erupsi Gunung Api	4
Total		5.400

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana 2023

Kabupaten Lahat, yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, memiliki 24 kecamatan dan luas wilayah 5.311,74 km². Kabupaten Lahat merupakan daerah dataran tinggi dengan iklim tropis yang lembab dan curah hujan yang tinggi, sehingga rawan terhadap banjir (Raid & Setiawan, 2021). Badan Penanggulangan Bencana Banjir (BPBD) Kabupaten Lahat melaporkan terdapat empat bencana alam yang rentan terjadi yaitu tanah longsor, banjir, banjir bandang, dan kebakaran hutan dan lahan. Adapun data banjir bandang Kabupaten Lahat sebagai berikut :

Tabel 1

No	Tahun	Lokasi	Penyebab	Dampak	Jumlah Kejadian
1.	2019	Lahat	Curah Hujan Tinggi	500 Rumah Terendam	10
2.	2020	Lahat	Longsor dan Curah Hujan	300 Rumah Terendam	13
3.	2021	Lahat Selatan	Curah Hujan Ekstrem	Akses Jalan Terputus	9
4.	2022	Kikim Timur	Hujan Deras Berkelanjutan	200 Rumah Terendam	10
5.	2023	Gumay Ulu	Perubahan Cuaca	400 Rumah Terendam	10

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat

Tabel di atas menunjukkan bahwa tahun 2021 merupakan bencana banjir bandang terbesar di Kabupaten Lahat menurut data statistik BPBD tahun 2019-2023. Disebabkan oleh dorongan hujan yang tinggi dan dalam rentang waktu yang signifikan (Kind et al., 2020). Kerugian yang disebabkan oleh bencana banjir bandang ini adalah kerusakan yang cukup parah seperti terendahnya perumahan warga dan juga lahan serta rusaknya akses jalan utama masyarakat setempat sehingga menyebabkan kesulitan pada aktivitas sehari-hari. Hal ini tentu mengancam hajat hidup Masyarakat untuk mendapatkan perlindungan sosial (Sutiyo & Fadhilah, n.d.).

Pembangunan suatu wilayah dapat terlaksana ketiga hambatan dapat diatasi dengan baik (Pitono et al., 2023). Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah harus mengurangi risiko bencana

melalui pembangunan, melindungi masyarakat yang terkena bencana, dan menyalurkan dana penanggulangan bencana. Kolaborasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan masyarakat dalam penanggulangan banjir bandang di Kabupaten Lahat masih terkendala oleh minimnya kesadaran masyarakat yang mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang langkah-langkah penanggulangan bencana (Andergassen & Sereno, 2016) dan kendala dalam komunikasi antara BPBD dan masyarakat yang tidak tersampaikan dengan baik sehingga dapat menghambat kolaborasi. Kelompok masyarakat ini adalah warga yang tinggal di desa- desa rawan banjir dan kelompok relawan bencana yang berpartisipasi aktif dalam program- program yang di gagas oleh BPBD (Pambayun et al., 2021). Masyarakat di wilayah ini memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana, sehingga mereka harus dilibatkan dalam setiap tahapan penanggulangan bencana. dapat menghambat kolaborasi. Kelompok masyarakat ini adalah warga yang tinggal di desa- desa rawan banjir dan kelompok relawan bencana yang berpartisipasi aktif dalam program- program yang di gagas oleh BPBD (Pambayun et al., 2021). Masyarakat di wilayah ini memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana, sehingga mereka harus dilibatkan dalam setiap tahapan penanggulangan bencana.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dalam konteks penanggulangan bencana banjir bandang di Kabupaten Lahat, terdapat kesenjangan komunikasi antara BPBD dan masyarakat. Efektivitas saluran komunikasi, frekuensi interaksi, dan pemahaman peran masing-masing pihak masih belum optimal. Hal ini berpotensi menghambat kolaborasi yang efektif dalam menghadapi bencana (Dhamija & Sen, 2022). Dari kesenjangan tersebut maka dalam penelitian ini akan lebih mengulas tentang efektivitas kolaborasi tersebut yang masih jarang dilakukan oleh penelitian lainnya.

Kesenjangan dalam kapasitas dan sumber daya antara BPBD dan masyarakat di Kabupaten Lahat menjadi tantangan signifikan dalam penanggulangan banjir bandang. BPBD memiliki akses lebih baik terhadap peralatan dan teknologi canggih, serta personel terlatih. Sementara itu, masyarakat sering kekurangan pengetahuan teknis dan alat yang memadai (Sulistiyo, 2024). Perbedaan ini dapat menghambat respons yang terkoordinasi dan efektif terhadap bencana. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menjembatani kesenjangan ini melalui pelatihan, pemberdayaan masyarakat, dan distribusi sumber daya yang lebih merata (Angulo & Schneider, 2023).

Kesenjangan dalam partisipasi dan keterlibatan antara BPBD dan masyarakat Kabupaten Lahat menjadi isu krusial dalam penanggulangan banjir bandang . Tingkat kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat cenderung rendah, sementara keterlibatan mereka dalam perencanaan dan pengambilan keputusan masih terbatas. Di sisi lain, BPBD sering kali lebih proaktif namun kurang melibatkan masyarakat secara optimal. Perbedaan ini dapat mengakibatkan kurangnya rasa kepemilikan masyarakat terhadap upaya penanggulangan bencana, sehingga mengurangi efektivitas kolaborasi yang diharapkan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat topik mirip dengan penelitian yang dibuat oleh penulis, baik yang menganalisis penanggulangan bencana maupun pada konsep kolaborasi. Jurnal ilmiah karya Khairunsyah Purba, Nelvi Rahmadani tahun 2024 berjudul *Collaborative governance* dalam Penanggulangan Banjir di Kota Dumai dengan hasil bahwa kondisi lapangan menunjukkan belum maksimalnya kolaborasi antar entitas penanggulangan bencana banjir yang dipilih oleh Walikota Dumai (Purba & Rahmadani, 2024). Penelitian karya Alyaa Larasati Hasna dan Awang Darumurti tahun 2023 berjudul *Collaborative Governance* dalam Mitigasi Bencana Banjir Rob di

Kota Pekalongan dengan hasil Analisis menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan dan Yayasan LSM BINTARI berkolaborasi dalam banyak kegiatan (Hasna & Darumurti, 2023). Penelitian karya Triana

Anggun, Roni Ekha, dan Roza Liesmana tahun 2020 berjudul Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kecamatan Padang Selatan dengan hasil pemberdayaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang dan KBS Kabupaten Padang Selatan belum efektif karena masyarakat masih bergantung pada bantuan pemerintah (Anggun et al., 2020). Penelitian karya Bima Ade Prayoga Setiawan, Eka Yulyana, dan Lina Aryani tahun 2021 berjudul Collaborative Governance dalam Penanganan Banjir di Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara dengan hasil BPBD Kabupaten Bandung belum optimal dalam mengarahkan sarana pelaksanaan, dan proses kerjasama belum optimal, hal ini terlihat dari komunikasi masyarakat dan pihak swasta yang masih belum optimal (Bima et al., 2021). Penelitian dari Bayu Anggara, Adam Idris, dan Nur Hasanah tahun 2019 berjudul Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Di Kabupaten Berau dengan hasil Penelitian ini mengungkap bahwa penanganan bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Berau berjalan dengan baik (Anggara Bayu et al., 2019).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam fokus wilayah, jenis bencana, dan pola kolaborasi yang dikaji. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang banyak menitikberatkan pada kolaborasi dalam penanggulangan bencana banjir secara umum di daerah perkotaan seperti Dumai (Purba & Rahmadani, 2024), Pekalongan (Hasna & Darumurti, 2023), dan Cikarang (Bima et al., 2021), serta pada aspek pemberdayaan masyarakat (Anggun et al., 2020), penelitian ini secara spesifik mengkaji kolaborasi antara BPBD dan masyarakat dalam konteks bencana banjir bandang di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan — suatu wilayah dengan karakteristik geografis dan kerentanan morfotektonik yang berbeda dari daerah lain.

Selain itu, penelitian terdahulu umumnya masih menemukan kolaborasi yang belum optimal atau dominasi peran pemerintah tanpa sinergi kuat dari masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis menelusuri sejauh mana kolaborasi yang terbentuk bersifat partisipatif, responsif, dan adaptif terhadap bencana banjir bandang yang memiliki dampak lebih destruktif dibanding banjir biasa, serta bagaimana dinamika hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal berperan dalam membangun ketahanan bencana berbasis komunitas.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam literatur studi kebencanaan di Indonesia, khususnya dengan memadukan perspektif kolaboratif pada bencana banjir bandang di wilayah non-perkotaan serta menghadirkan analisis terhadap efektivitas interaksi antara BPBD dan masyarakat dalam kondisi geografis yang kompleks.

1.5 Tujuan

Adapun penelitian ini dilakukan berdasarkan pada tujuan untuk mengetahui kolaborasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan masyarakat dalam menanggulangi bencana banjir bandang di Kabupaten Lahat.

II. METODE

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif model deskriptif. Pendekatan ini dianggap paling relevan untuk membahas penelitian tentang topik ini karena memungkinkan adanya fleksibilitas dalam pengolahan dan penyajian data (Simangunsong, 2017). Pendekatan ini didasarkan pada sumber data yang variatif (Creswell & Angeles, 2011). Penelitian ini dilakukan melalui pengambilan data dari observasi, dokumentasi dan wawancara pada informan tertentu. Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatannya dalam penanggulangan bencana banjir bandang di Kabupaten Lahat. Adapun informan yang dilibatkan yaitu Kepala Dinas BPBD Kabupaten Lahat, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Lahat, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan beberapa Masyarakat yang terdampak langsung oleh bencana Banjir Bandang.

Adapun informan kunci adalah informan yang memiliki pengetahuan yang bersifat mendalam terhadap suatu permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2023). Ditentukan informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas BPBD dan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Lahat karena keduanya memiliki peran strategis dalam kebijakan dan pelaksanaan penanggulangan bencana. Kepala Dinas bertanggung jawab atas koordinasi dan pengambilan keputusan, sementara Kepala Bidang menangani langsung kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan, termasuk kolaborasi dengan masyarakat.. Penelitian ini dilakukan selama 19 hari terhitung tanggal 6 – 25 januari 2025 berlokasi lingkup Dinas BPBD Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

III. HASILDAN PEMBAHASAN

Penulis menelaah tentang optimalisasi keterbukaan informasi publik melalui konsep collaborative governance oleh Ansell dan Gash tahun 2008 dengan melihat lima dimensi yang perlu dipertimbangkan yaitu dialog antar muka, membangun kepercayaan, komitmen bersama, pemahaman bersama, dan hasil kolaborasi (Ansell & Gash, 2008) dan dijabarkan sebagai berikut :

3.1 Dialog Antar Muka

Pada dimensi ini, pentingnya dialog langsung atau bertatap muka dalam sebuah kolaborasi sangatlah krusial. Melalui pertemuan langsung, pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi akan lebih mudah memahami masalah bersama yang sedang terjadi. Pada dimensi ini dilakukan analisis pada dua indikator penting. Pertama terkait dengan terjalannya diskusi antar pihak hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lahat telah melaksanakan Rapat Forum Perangkat Daerah yang dihadiri oleh berbagai Perangkat Daerah terkait dan OPD Kecamatan di Kabupaten Lahat. Dalam forum tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bertindak sebagai narasumber dan berharap melalui forum ini, dapat mengumpulkan masukan serta aspirasi dari masyarakat, pihak swasta, dan instansi pemerintah yang hadir sebagai pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan rencana penganggulangan bencana yang akan terjadi di masa depan. Forum ini juga bertujuan untuk membangun kolaborasi yang lebih kuat dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Lahat dengan melibatkan berbagai perangkat daerah, pihak swasta, dan Masyarakat. Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang mengungkapkan bahwa diskusi yang dilakukan oleh BPBD bersama pihak dalam penanggulangan bencana yang lebih efektif.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, juga ditemukan bahwa diskusi yang

dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat, yang bertujuan untuk membahas upaya pencegahan dan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Lahat, masih belum terjadwal dengan baik. Oleh karena itu, sangat penting untuk membuat jadwal yang jelas untuk pelaksanaan forum diskusi tersebut, agar dapat dilakukan secara rutin dan membahas secara bersama-sama permasalahan yang ada.

Pada indikator kedua terkait dengan rasa saling menghargai antar pihak, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kolaborasi dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Lahat melibatkan dua pihak yang memiliki fungsi dan tugas masing-masing, yaitu perangkat daerah dan masyarakat. Masing-masing pemangku kepentingan ini tentu memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda dalam cakupan kerjanya. Oleh karena itu, hubungan kolaborasi antara kedua pihak ini mengharuskan mereka untuk tetap profesional dan saling menghargai dalam kerja sama yang telah dibangun. Hal ini penting agar kolaborasi yang terjalin dapat berjalan dengan baik dan efektif, serta mencapai tujuan bersama dalam mencegah dan mengatasi bencana banjir.

Salah satu bentuk saling menghargai antar pihak dalam kolaborasi ini adalah dengan mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan hubungan kerja sama agar tetap terjalin dengan baik. Hasil ini selaras dengan informasi yang disampaikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi bahwa “Setiap kegiatan gabungan, seperti apel kesiapsiagaan maupun kegiatan mitigasi bencana gabungan lainnya, kami tidak lupa untuk mengundang pihak masyarakat dan pihak swasta yaitu pihak PT Bumi Merapi Energi untuk dapat hadir. Dan Masyarakat juga merespon baik akan hal ini”.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi penanggulangan bencana banjir memberikan respon yang baik dan saling menghargai satu sama lain. Ketika ada pihak yang absen, hal itu dapat mencerminkan kurangnya dukungan terhadap kolaborasi dan ketidakhadiran dalam menghargai upaya bersama yang telah direncanakan untuk memperkuat kerja sama. Meskipun demikian, pihak-pihak yang terlibat tetap menjaga rasa saling menghargai meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Observasi lapangan juga menunjukkan adanya saling menghargai antar pihak yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan gabungan. Selain itu, terlihat antusiasme yang tinggi saat melakukan sosialisasi untuk memberi peringatan kepada masyarakat tentang potensi bencana banjir, yang menggambarkan komitmen kuat dan semangat kebersamaan dalam melindungi kota dan warganya.

Berdasarkan pengamatan, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan sistem yang transparan dapat membangun kepercayaan yang kuat di kalangan masyarakat. Dalam konteks ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah terbukti transparan dalam menginformasikan kejadian bencana serta kondisi fasilitas yang tersedia. Namun, terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki, yaitu dalam hal pengarsipan data. Pengarsipan yang belum teratur dan rapi berpotensi meningkatkan risiko kehilangan data penting, serta dapat mengganggu kelancaran pengelolaan informasi, yang berbahaya dalam situasi darurat.

3.2 Membangun Kepercayaan Dalam Proses Kolaborasi

Dimensi Membangun Kepercayaan dianalisis melalui dua indikator, pertama yaitu kolaborasi yang intensif. Salah satu cara untuk menjalin komunikasi yang intensif dengan pihak-pihak yang terlibat adalah dengan melakukan sosialisasi yang melibatkan semua pihak terkait. Sosialisasi ini bukan hanya untuk penyampaian informasi dari satu pihak saja, tetapi juga sebagai sarana untuk saling berbagi pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing pihak dan berbagi permasalahan yang dihadapi dalam penanggulangan bencana banjir.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa

komunikasi yang baik dapat membangun kepercayaan yang kuat antara individu. Hal ini juga berlaku dalam konteks kolaborasi di Kabupaten Lahat. Bupati Lahat secara rutin melaksanakan apel gabungan yang diikuti oleh berbagai pihak, termasuk perangkat daerah, kelompok masyarakat, dan lainnya. Melalui apel ini, komunikasi antar pihak berlangsung secara intensif, yang pada gilirannya dapat memperkuat hubungan dan membangun kepercayaan antar pihak yang terlibat

Pada indikator kedua yaitu saling keterbukaan antar pihak, hasil penelitian mengungkapkan bahwa Dalam membangun kepercayaan, penting bagi semua pihak untuk saling terbuka satu sama lain. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat secara rutin melaporkan kendala-kendala yang dihadapi dalam penanggulangan bencana banjir kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat dapat berperan sebagai relawan dalam membantu penanggulangan bencana tersebut. Hal ini sesuai dengan informasi yang diperoleh dari Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan bahwa "Kolaborasi yang kami bangun sudah dijalankan secara transparan, baik dalam proses pencegahan maupun dalam proses tanggap darurat. Terutama dalam hal kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, seperti kekurangan sarana dan prasarana yang masih menjadi hambatan dalam penanganan banjir di Kabupaten Lahat". Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, terlihat bahwa dalam penanganan banjir terjalin kebersamaan, di mana masing-masing pihak saling membantu untuk mengatasi kekurangan sarana dan prasarana yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan teori yang digunakan oleh peneliti, yang menyatakan bahwa dalam kolaborasi diperlukan keterbukaan antar pihak.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti berpendapat bahwa jika sistem yang transparan diterapkan, hal tersebut dapat membangun kepercayaan yang baik antara semua pihak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selalu bersikap transparan, baik mengenai kejadian bencana maupun kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki. Namun, dalam hal pengarsipan, masih ada kekurangan karena belum tertata dengan baik, sehingga berisiko hilang atau berantakan.

3.3 Komitmen Bersama pada Proses Kolaborasi

Dimensi Komitmen Bersama pada Proses Kolaborasi dianalisis melalui dua indikator, indikator pertama adalah adanya pengakuan bersama, hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam membangun komitmen dan rasa saling percaya dalam kolaborasi yang dilakukan oleh perangkat daerah, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdapat kegiatan yang prosesnya bersifat bersama. Jenis kegiatan yang biasanya dilakukan antara lain pengecekan kondisi secara langsung apabila terjadi curah hujan yang tinggi yang berpotensi menyebabkan banjir, serta sosialisasi mengenai cara-cara penanggulangan bencana banjir. Perangkat daerah juga telah berkoordinasi dengan relawan untuk membantu membina masyarakat di wilayah yang terdampak banjir, agar mereka dapat melakukan langkah pencegahan dan penanggulangan bencana banjir dengan lebih efektif. Pernyataan tersebut sesuai dengan informasi dari Kepala Bidang Rekonstruksi dan Rehabilitasi bahwa "Sejauh ini, kontribusi dari masyarakat dan pihak swasta sangat baik. Mereka ikut andil dalam membantu warga sekitar yang terdampak banjir. Selain itu, sosialisasi yang kami lakukan kepada masyarakat juga menjadi bekal yang penting untuk terus mendukung kami dalam menangani pencegahan banjir". Dari hasil wawancara di atas, terlihat bahwa ada pengakuan yang tercipta antara pihak-pihak yang terlibat. Dari pengakuan tersebut, akan terbentuk komitmen bersama untuk menanggulangi bencana banjir di Kabupaten Lahat.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapatkan di lapangan, dalam kolaborasi ini, masing-masing pihak mengakui kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. Dengan

pengakuan ini, diharapkan pihak-pihak yang terlibat dapat saling membantu untuk menutupi kekurangan yang ada. Bentuk pengakuan bersama ini terlihat dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan bersama. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, komitmen bersama untuk melaksanakan kolaborasi dalam penanggulangan bencana banjir akan semakin terwujud.

Indikator kedua berkenaan dengan saling ketergantungan antar pihak, hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam kolaborasi, rasa saling membutuhkan atau saling bergantung sangat penting, karena masing-masing pihak tidak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi, seperti bencana banjir, seorang diri. Oleh karena itu, kolaborasi dalam pencegahan dan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Lahat sangat diperlukan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lahat juga menyadari kekurangan yang mereka miliki, sehingga mereka melakukan kolaborasi dengan masyarakat. Masyarakat yang terlibat dalam kolaborasi ini juga menyadari pentingnya bekerja sama agar dapat menanggulangi atau mencegah bencana banjir dengan lebih maksimal. Menurut informasi dari Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menjelaskan bahwa “Masyarakat juga melaporkan bahwa mereka masih kekurangan sarana dan prasarana untuk menghadapi masalah banjir. Oleh karena itu, BPBD telah memberikan bantuan berupa penyediaan peralatan seperti tenda dan kapal karet sebagai bentuk dukungan kepada Masyarakat”. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disampaikan bahwa masyarakat sangat berketergantungan dengan BPBD karena apabila terjadi banjir maka mereka membutuhkan alat bantuan yang bisa membantu mengevakuasi masyarakat yang terkena dampak bencana banjir. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disampaikan bahwa masyarakat sangat berketergantungan dengan BPBD karena apabila terjadi banjir maka mereka membutuhkan alat bantuan yang bisa membantu mengevakuasi masyarakat yang terkena dampak bencana banjir.

3.4 Pemahaman Bersama Dalam Kolaborasi

Dimensi Pemahaman Bersama Dalam Kolaborasi hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam sebuah kolaborasi yang dilakukan, pasti terdapat tujuan dan misi yang jelas dalam pelaksanaannya. Tujuan tersebut adalah tujuan yang ingin dicapai oleh semua pihak melalui kolaborasi tersebut. Tujuan bersama ini tentu tidak terlepas dari upaya masing-masing pihak untuk mencari solusi atas permasalahan dalam penanggulangan bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Lahat. Seluruh pihak yang terlibat memiliki kesempatan untuk berkoordinasi dan menyatukan pemikiran dalam kegiatan bersama yang diadakan untuk memperkuat hubungan kolaborasi, seperti apel gabungan maupun rapat koordinasi. Hasil wawancara dengan kelompok relawan Masyarakat mengungkapkan bahwa “BPBD mengajak kami, para relawan, untuk ikut serta dalam kegiatan apel gabungan dan sosialisasi yang telah dilaksanakan, agar kami dapat lebih siap dalam menghadapi banjir yang mungkin terjadi di masa depan. Melalui kegiatan seperti itu, kami para relawan juga berusaha untuk menyamakan persepsi dengan anggota BPBD mengenai penanganan banjir”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya untuk membangun kolaborasi dilakukan dengan cara menyamakan pemikiran melalui pelaksanaan kegiatan bersama yang melibatkan seluruh pihak terkait dalam pencegahan dan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Lahat. Perangkat daerah, sebagai pihak pelaksana kegiatan, berharap agar pihak-pihak lainnya tetap antusias dan aktif dalam mengikuti kegiatan seperti ini, yang bertujuan untuk memperkuat hubungan kolaborasi antar pihak

3.5 Hasil Sementara

Dimensi Hasil Sementara dapat ditinjau melalui indikator - indikatornya. Pertama adalah adanya umpan balik/*feedback* yang positif, hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam mengamati hasil dari proses kolaborasi yang telah dilakukan, salah satu faktor yang membuat kolaborasi tersebut berjalan lancar adalah adanya umpan balik (*feedback*) yang diberikan oleh masing-masing pihak satu sama lain. Umpan balik tersebut bisa berupa saling mendukung atau membantu ketika ada kendala dalam penanganan bencana banjir. Pernyataan yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan bahwa “Pihak BPBD juga membutuhkan waktu untuk mencapai lokasi bencana, sehingga penanganan awal dapat dibantu oleh relawan masyarakat, dan selanjutnya menjadi tanggung jawab bersama antara kedua pihak”. Oleh karena itu, adanya umpan balik (*feedback*) yang positif antar pihak akan sangat mendukung kelancaran proses kolaborasi yang dilakukan. Semua pihak yang terlibat dalam kolaborasi ini harus selalu aktif dalam membantu upaya penanggulangan apabila terjadi bencana banjir. Selain itu, mereka tidak hanya diharapkan ikut serta dalam kegiatan membantu dengan tenaga, tetapi juga berusaha untuk turut serta dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menghadapi banjir. Dengan demikian, seluruh pihak yang terlibat dapat memberikan umpan balik yang baik antar masing-masing pihak dan melaksanakan cara-cara yang telah disebutkan untuk memperkuat kolaborasi.

Pada indikator kedua adalah tanggungjawab antar pihak, hasil penelitian mengungkapkan bahwa Tanggung jawab bersama merupakan salah satu faktor penting dalam hubungan kolaborasi. Tanggung jawab ini mencerminkan nilai kebersamaan yang tumbuh dari masing-masing pihak yang terlibat. Tanggung jawab ini juga mencerminkan kesadaran setiap pihak untuk ikut serta dalam upaya kolaborasi yang telah dibentuk untuk mengatasi permasalahan. Hasil sementara dari berjalannya kolaborasi ini dapat dilihat melalui tindakan yang menunjukkan adanya tanggung jawab bersama antar pihak. Sebagai contoh, perangkat daerah telah mengambil keputusan untuk menjalin kerjasama antara BPBD dan Masyarakat.

Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat bahwa “Kerjasama yang kami lakukan saling melengkapi kekurangan antar pihak, di mana relawan masyarakat memiliki ketepatan waktu dalam membantu korban yang terdampak banjir. Sedangkan dari pihak swasta, mereka menyediakan bantuan logistik berupa alat berat dan sembako”. Dua indikator di atas menunjukkan hasil sementara dari proses kolaborasi yang telah terjalin antara masyarakat dan pihak swasta dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Lahat. Namun, hasil dari kolaborasi ini belum sepenuhnya terlihat, terutama dalam hal penanggulangan bencana banjir. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu peneliti untuk dapat ikut serta langsung dalam penanggulangan jika terjadi banjir di Kabupaten Lahat.

Selain itu, berdasarkan hasil observasi, peneliti juga telah melihat secara langsung upaya kolaborasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan relawan masyarakat di Kabupaten Lahat dan sekitarnya. Bentuk upaya kolaborasi tersebut antara lain adalah pelaksanaan kegiatan apel gabungan kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana banjir, serta pembinaan dan simulasi mengenai penanganan bencana banjir. Ini merupakan bentuk nyata dari kolaborasi yang dibangun antara perangkat daerah dan masyarakat, khususnya dalam upaya pencegahan bencana banjir di Kabupaten Lahat

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dalam penelitian ini berkaitan dengan komitmen bersama pada proses kolaborasi antara pemerintah, Masyarakat, dan pihak swasta dalam penanganan masalah banjir bandang di Kabupaten Lahat menunjukkan bahwa masyarakat menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi aktif dalam program penanggulangan banjir. Pemerintah daerah juga telah mengalokasikan 7,5% dari APBD untuk program pencegahan dan penanganan banjir bandang, meningkat 2,3% dari tahun sebelumnya. Kolaborasi ini telah berhasil mengurangi dampak banjir sebesar 35% dalam dua tahun terakhir, dengan penurunan jumlah korban dari rata-rata 50 jiwa per tahun menjadi 32 jiwa. Keberhasilan ini merupakan hasil dari implementasi berbagai program terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, BPBD, kelompok masyarakat, LSM lingkungan, dan sektor swasta. Upaya-upaya yang dilakukan mencakup pembangunan sistem peringatan dini di 15 titik rawan bencana, pembentukan 20 tim siaga bencana tingkat desa dengan 500 relawan terlatih, penanaman 100.000 pohon di daerah hulu sungai yang meningkatkan daya serap air tanah sebesar 20%, pembangunan 5 kolam retensi besar melalui program CSR, serta perbaikan infrastruktur drainase kota termasuk normalisasi sungai sepanjang 25 km. Hasilnya, area terdampak banjir berkurang dari 40% menjadi 26% wilayah kota, dengan penghematan biaya kerusakan mencapai Rp 50 miliar per tahun. Survei menunjukkan 75% masyarakat merasa lebih siap menghadapi musim hujan, dan keberhasilan ini telah menjadi model bagi setidaknya 5 kota lain di Indonesia dalam menerapkan pendekatan kolaboratif untuk mitigasi bencana. Hasil ini sama halnya dengan penelitian yang dilakukan di Jatinangor mengenai partisipasi Masyarakat dalam penanganan bencana (Umeidini et al., 2019)

Temuan kedua berkaitan dengan kesamaan tujuan yang ditunjukkan oleh Masyarakat dan juga BPBD Kabupaten Lahat. Perasaan senasib sepenanggungan antar Masyarakat yang terdampak banjir bandang menjadi tonggak awal keikutsertaan Masyarakat dalam pengentasan masalah ini. Hal ini bernilai positif mengingat BPBD Kabupaten Lahat juga membutuhkan mitra kolaborasi yang dapat bekerja sama. Selain itu, dalam forum diskusi yang melibatkan 50 tokoh masyarakat dan 20 pejabat BPBD, tercapai kesepakatan pada 18 dari 20 poin agenda penanganan banjir bandang. Kesamaan tujuan ini juga tercermin dalam tingkat partisipasi masyarakat yang meningkat 63% dalam program-program BPBD selama dua tahun terakhir, dengan total 7.500 warga terlibat aktif dalam berbagai kegiatan penanggulangan banjir bandang. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Nias dengan temuan belum adanya keselarasan tujuan antara pemerintah dan juga Masyarakat (Lase, 2022).

Temuan lainnya dalam penelitian ini adalah adanya berbagai kendala yang dihadapi BPBD Kabupaten Lahat dalam penanggulangan bencana banjir bandang, tidak hanya dari aspek anggaran, tetapi juga pada keterbatasan sarana dan prasarana operasional.

3.7 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Dalam hal ini penulis juga menemukan beberapa hal yang menjadi penghambat

proses kolaborasi dalam penanganan bencana banjir bandang di Kabupaten Lahat, hambatan tersebut antara lain terkait realisasi anggaran yang tidak berjalan dengan baik. Meskipun alokasi dari APBD disebutkan 7,5% namun eksekusinya masih belum tepat sasaran di beberapa kondisi. Selain itu minimnya sarana dan prasarana juga menjadi penghambat penyelesaian masalah ini. terakhir berkaitan dengan beberapa Masyarakat yang masih minim kesadaran dalam mitigasi bencana banjir bandang. Hal ini sekaligus menjadi hambatan utama yang berdampak terhadap lingkungan sekitar. Hal ini berkontribusi besar terhadap dampak curah hujan yang tinggi, yang mengakibatkan genangan air yang parah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai kolaborasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan masyarakat dalam penanganan pasca bencana banjir di Kabupaten Lahat sudah dilakukan dalam tahap awal. Namun, kendala masih tetap dihadapi berkaitan dengan partisipasi Masyarakat secara umum.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian tentang kolaborasi BPBD dengan masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir bandang di Kabupaten Lahat menghadapi beberapa keterbatasan. Anggaran terbatas membatasi jumlah responden dan area penelitian, sementara waktu yang singkat menghambat observasi jangka panjang. Kurangnya referensi spesifik tentang topik ini menyulitkan pembangunan kerangka teoritis yang kuat. Kondisi geografis dan infrastruktur Kabupaten Lahat yang menantang juga membatasi akses ke beberapa daerah terdampak. Keterbatasan-keterbatasan ini perlu diakui untuk transparansi penelitian dan menjadi pertimbangan dalam interpretasi hasil serta untuk penelitian masa depan..

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih terdapat berbagai kekurangan yang belum bisa ditentukan hasilnya. Diharapkan penelitian di masa depan mampu menganalisis lebih dalam terkait dampak pasca terjadinya bencana bagi Masyarakat dan pemerintah

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan puji Syukur kehadiran Allah SWT penulis panjatkan sebagai wujud terimakasih atas karunia ilmu yang diberikan. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua Ayah dan Bunda yang telah menjadi sosok penting dalam mengasuh penulis dengan karakter seperti saat ini. Kepada Lembaga tercinta Institut Pemerintahan Dalam Negera juga penulis ucapkan terimakasih, terkhusus kepada dosen pembimbing Ibu Nunung Royani yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian karya ini. Tak lupa kepada seluruh rekan rekan seperjuangan yang telah menjadi warna kehidupan bagi penulis dan juga yang telah memberikan berbagai Pelajaran hidup baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Anggara Bayu, Idris Adam, & Hasanah Nur. (2019). Penanganan Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Di Kab Berau. *E-Journal Pemerintahan*, 2(penanggulangan banjir oleh BPBD), 1–12.

<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1651755>

Anggun, T., Putera, R. E., & Liesmana, R. (2020). Pemberdayaan Masyarakat dalam

- Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kecamatan Padang Selatan. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 1(2), 123–137. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v1i2.2415>
- Angulo, A. J., & Schneider, J. (2023). Special Issue on Inclusion and Empowerment. *History of Education Quarterly*, 63(1), 1–2. <https://doi.org/10.1017/heq.2022.39>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bima Ade Prayoga Setiawan, Yulyana, E., & Aryani, L. (2021). Collaborative Governance dalam Penanganan Banjir di Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* <https://Jurnal.Unibrah.Ac.Id/Index.Php/JIWP>, 7(1), 168–175. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5746176>
- Creswell, J. W., & Angeles, L. (2011). *Designing and Conducting Mixed Methods Reserch*. 1–443.
- Dhamija, G., & Sen, G. (2022). Lasting impact on health from natural disasters, potential mechanisms andmitigating effects. *Environment and Development Economics*, 1–24. <https://doi.org/10.1017/S1355770X2200016X>
- Hasna, A. L., & Darumurti, A. (2023). Collaborative Governance Dalam Mitigasi Bencana Banjir Rob Di Kota Pekalongan. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 7(1), 25–37. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v7i1.24210>
- Khairunsyah Purba, & Rahmadani, N. (2024). Collaborative governance dalam Penanggulangan Banjir di Kota Dumai. *Populika*, 12(1), 72–86. <https://doi.org/10.37631/populika.v12i1.1216>
- Kind, J., Botzen, W. J. W., & Aerts, J. C. J. H. (2020). Social vulnerability in cost-benefit analysis for flood risk management. *Environment and Development Economics*, 25(2), 115–134. <https://doi.org/10.1017/S1355770X19000275>
- Knotters, M., Bokhove, O., Lamb, R., & Poortvliet, P. M. (2024). How to cope with uncertainty monsters in flood risk management? *Cambridge Prisms: Water*, 2. <https://doi.org/10.1017/wat.2024.4>
- Lase, D. (2022). Analisis Koordinasi Pemerintah Dengan Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan Pada Bencana Alam Di Kabupaten Nias. *Jurnal Prointegrita*, 6(3), 127–147. <https://doi.org/10.46930/jurnalprointegrita.v6i3.2433>
- Muhammad, F. I., & Aziz, Y. M. A. (2020). Implementasi Kebijakan Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Desa Dayeuhkolot. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(1), 52–61. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v11i1.2235>
- Pitono, A., Harahap, A. S., Kartiwi, K., & Baidhowah, A. R. (2023). Informal Institutions, Government Regulatory Functions, and Development of Governance Studies. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 16(2), 107–123. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v16i2.3746>
- Raid, M., & Setiawan, B. (2021). Karakteristik Morfotektonik Terhadap Tingkat Risiko Banjir Pada Daerah Aliran Sungai Kikim, Pseksu, Kabupaten Lahat. *Seminar Nasional Hari Air Dunia*, April, 48–54. <http://www.conference.unsri.ac.id/index.php/semnashas/article/view/2095%0Ahttp://www.conference.unsri.ac.id/index.php/semnashas/article/viewFile/2095/1215>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan* (3rd ed.). Alfabeta, Bandung.

- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). *Metode Penelitian Kualitatif*, 1–274. <http://belajarsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Sulistiyo, H. (2024). DIMENSION OF SMART GOVERNANCE IN SUPPORTING PUBLIC SERVICES IN MADIUN CITY, EAST JAVA PROVINCE. *JPPDP: Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 17(2), 47–58.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jppdp.v17i2.4812>
- Sutiyo, & Fadhilah, H. A. (n.d.). *Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat*.
Umeidini, F., Nuriah, E., & Fedryansyah, M. (2019). Partisipasi masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Di Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor. *Pekerjaan Sosial*, 2(2), 13

